

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan adalah negara yang secara geografis sangat strategis, dimana posisinya terletak di kawasan *East Asia* yang sangat rawan akan konflik dan instabilitas keamanan (Syahrin, 2018). Dalam hal ini, ancaman keamanan utama yang dihadapi oleh Korea Selatan berasal dari Korea Utara. Program nuklir Korea Utara merupakan permasalahan keamanan yang paling membahayakan di Semenanjung Korea, bahkan di kawasan Asia Timur (Park, 2011). Berbagai uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tentu mengancam stabilitas keamanan Korea Selatan yang letaknya paling dekat dengan Korea Utara. Terlebih sejak memimpin Korea Utara pada tahun 2011, Kim Jong-un kerap meningkatkan pengujian senjata nuklir dan rudal untuk melawan ancaman terbesar bagi Korea Utara, yakni Amerika Serikat. Pada tahun 2017, Korea Utara juga menguji senjata nuklir yang jauh lebih kuat daripada senjata nuklir yang digunakan pada tahun 1945 (Klingner, 2018). Selain itu, Korea Selatan memang kerap bersitegang dengan Korea Utara terkait masalah keamanan, misalnya tahun 2010, kapal milik Korea Selatan ditenggelamkan oleh Korea Utara (Ban, 2021).

Adanya percobaan nuklir keempat yang dilakukan oleh Korea Utara pada awal tahun 2016 meningkatkan dorongan bagi Korea Selatan untuk menambah komponen pertahanan dan keamanannya (Institute for Security and Development Policy, 2017). Guna menghadapi agresivitas nuklir Korea Utara, Korea Selatan yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Park Geun-Hye menyepakati kerja sama dengan Amerika Serikat dalam menempatkan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). THAAD merupakan sistem pertahanan yang dirancang untuk mencegah rudal balistik di semenanjung Korea sebagai tindakan defensif terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara (Kim & Lee, 2021). Dengan menempatkan THAAD, Korea Selatan berharap dapat membendung ancaman nuklir Korea Utara melalui penggabungan teknologi Amerika Serikat dengan teknologinya sendiri (Min-Sik, 2013).

Meskipun bersifat defensif, kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menempatkan THAAD mendapatkan respon yang negatif dari China. Bahkan, sebelum THAAD resmi ditempatkan di Korea Selatan, Presiden China yakni Xi Jinping telah meminta Presiden Korea Selatan saat itu yakni Park Geun-Hye agar menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengerahkan THAAD di Korea Selatan. Adapun pada tahun 2016, Liu Jie selaku duta besar China untuk Amerika Serikat menyatakan bahwasanya China menentang penyebaran THAAD di Korea Selatan karena merusak kepentingan keamanan strategis China dan negara-negara lain di kawasan, serta menghambat tujuan pemeliharaan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea (Kim K. , 2016).

Ketidaksetujuan China terhadap THAAD kemudian dipertegas oleh *spokeperson* Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, yang menyatakan bahwasanya posisi China terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan sangat jelas, dimana China dengan tegas menentang penyebaran THAAD. Padahal, menurut Komandan Angkatan laut Amerika Serikat, Gary Ross, THAAD merupakan sistem pertahanan yang dirancang untuk melawan rudal balistik regional jarak pendek dan menengah, dan hal tersebut tidak akan merusak *strategic deterrence* China (Mody, 2017). Namun, China tetap teguh dengan pendiriannya yang menolak penempatan THAAD di Korea Selatan. Geng Shuang juga menyatakan bahwasanya China akan berupaya untuk membela kepentingan nasionalnya, dimana konsekuensi yang ditimbulkan dari penempatan THAAD akan ditanggung oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan (Rauhala, 2017).

Adanya reaksi negatif dari China tidak membuat Korea Selatan menarik kembali keputusannya dalam menempatkan THAAD. Pada bulan Juli 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mengumumkan keputusan terkait penempatan THAAD, dimana peluncur pertama THAAD mulai beroperasi pada tahun 2017. Hal tersebut membuat China mengajukan protes resmi dan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap THAAD. China melakukan kampanye publik yang agresif untuk menentang THAAD melalui pernyataan resmi dan media yang dikelola oleh Pemerintah China. Beberapa bulan setelah Korea Selatan

menempatkan THAAD, adanya penolakan terhadap THAAD menjadi tema yang konsisten dalam pernyataan resmi China, dimana Kementerian Luar Negeri China telah menentang THAAD lebih dari 50 kali (Meick & Salidjanova, 2017).

Penentangan China terhadap eksistensi THAAD di Korea Selatan kemudian ditunjukkan melalui pemberlakuan sanksi ekonomi. Hal tersebut ditujukan guna mendorong Korea Selatan agar mengubah keputusannya dalam menempatkan THAAD. China cenderung tidak memberikan perintah tertulis dalam memberikan sanksi ekonomi dan lebih memilih untuk menginstruksikan adanya sanksi tersebut secara verbal (Mullen, 2017). Sanksi ekonomi yang diberikan oleh China cukup berpengaruh terhadap Korea Selatan, mengingat bahwasanya perekonomian Korea Selatan cenderung bergantung pada China. Saat ini, China telah menjadi mitra dagang terbesar Korea Selatan (Kim M. H., 2016)

Hubungan bilateral China dan Korea Selatan telah memberikan keuntungan yang signifikan dalam bidang perekonomian, terutama bagi Korea Selatan. China menjadi tujuan terbesar ekspor Korea Selatan, dimana Korea mengekspor ke China senilai \$ 150 B dengan *partner share* sebesar 25 persen (The Macro Connections Group, 2017). Contoh lainnya dari ketergantungan perekonomian Korea Selatan terhadap China yakni dalam sektor pariwisata, dimana wisatawan China menyumbang 47 persen dari semua kedatangan wisatawan ke Korea Selatan (Gibson, 2017). Sanksi ekonomi akan berdampak negatif pada kepentingan Korea Selatan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menekan *decision maker* Korea Selatan (Jian, 2017).

Bentuk sanksi ekonomi China ditunjukkan melalui boikot budaya dan hiburan dari Korea Selatan, pelarangan impor produk Korea Selatan dan pelarangan paket perjalanan wisata. Dalam hal budaya dan hiburan misalnya, dimana China melarang masuknya Hallyu ke negaranya. Padahal Hallyu telah menjadi salah satu instrumen yang mempererat hubungan kedua negara, sekaligus membawa keuntungan bagi Korea Selatan. Akan tetapi, penempatan THAAD menyebabkan China melakukan boikot terhadap masuknya Hallyu. Tak lama setelah Korea Selatan mengumumkan THAAD, saluran televisi milik negara melaporkan bahwasanya regulator penyiaran milik Pemerintah China telah melarang

penayangan acara televisi Korea Selatan. Industri media China menyatakan bahwasanya agensi memberikan perintah untuk melarang konten Korea Selatan dari layanan *streaming online*, melarang selebriti Korea Selatan tampil di acara televisi, dan membatasi kerja sama dengan perusahaan hiburan Korea Selatan (Cho, 2017).

China juga memutuskan untuk melarang impor produk Korea Selatan, misalnya produk makanan, elektronik, dan kosmetik. Selain itu, perusahaan otomotif Korea Selatan seperti Hyundai Motor Company dan Kia Motors juga terkena dampak dari sanksi ekonomi China (Kye Wan, 2017). Lotte Group sebagai salah satu perusahaan waralaba terbesar Korea Selatan yang telah menginvestasikan lebih dari sepuluh triliun won dalam operasinya di China sejak 1994 juga mengalami kerugian, dimana sekitar 80 persen dari 112 toko Lotte Mart di China ditutup (Presse, 2017). Sektor pariwisata Korea Selatan juga mengalami dampak paling signifikan dari adanya sanksi ekonomi dari China. The China National Tourism Administration menginstruksikan agar perwakilan agen perjalanan di Beijing berhenti menjual paket tur ke Korea Selatan, dimana perusahaan yang tidak mematuhi keputusan tersebut akan dicabut lisensinya dan dikenakan denda (Harris & Jung-a, 2017). Hal tersebut lantas membuat Korea Selatan mengalami kerugian dalam sektor pariwisata, dimana terjadi penurunan yang cukup drastis pada angka kedatangan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Korea Selatan tahun 2017.

Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh China terhadap THAAD yang ditunjukkan dengan diberlakukannya sanksi ekonomi, maka hal tersebut menjadi suatu permasalahan baru bagi Korea Selatan. Tujuan kebijakan luar negeri Korea Selatan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menempatkan THAAD ialah untuk melindungi keamanannya, namun malah menimbulkan masalah bagi Korea Selatan dalam bidang lain yang juga krusial, yakni perekonomian. Apalagi mengingat bahwasanya China menduduki posisi yang penting bagi perekonomian Korea Selatan. Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-In pasca pemakzulan Presiden Park Geun-Hye kemudian berupaya mengatasi dampak yang ditimbulkan dari sanksi ekonomi China. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan luar negeri

Korea Selatan dalam menyikapi sanksi ekonomi China terkait penempatan THAAD.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan tinjauan karya akademis atau penelitian yang memiliki kemiripan atau keterkaitan dengan topik penulis. Berbagai literatur tersebut akan dijadikan referensi dalam penelitian penulis dengan judul ‘KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN DALAM MENYIKAPI SANKSI EKONOMI CHINA TERKAIT PENEMPATAN SISTEM PERTAHANAN TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD)’.

Literatur pertama merupakan artikel dari jurnal *Contemporary Security Policy* yang ditulis oleh Yong Sub Choi pada tahun 2020 yang berjudul ‘KEEPING THE AMERICANS IN: THE THAAD DEPLOYMENT ON THE KOREAN PENINSULA IN THE CONTEXT OF SINO-AMERICAN RIVALRY (Choi, 2020)’. Artikel tersebut berargumen bahwasanya Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan tidak dapat melindungi wilayah tersebut, termasuk Seoul dan Incheon, dari serangan rudal Korea Utara. Sehingga artikel tersebut mengkaji alasan pemerintah Korea Selatan menempatkan THAAD terlepas dari adanya pembalasan dari China. Artikel tersebut berpendapat bahwa keputusan THAAD dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperkuat aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan di tengah meningkatnya ancaman nuklir Korea Utara dan memperdalam persaingan China dan Amerika Serikat.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwasanya Korea Selatan berupaya untuk dapat menerapkan THAAD agar dapat memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, kondisi geopolitik Korea Selatan, yaitu berbatasan dengan Utara Korea telah memaksanya untuk bergantung pada aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan untuk menjaga keamanan nasional. Pilihan untuk menyebarkan THAAD adalah pilihan yang diperhitungkan, mengacu pada nuklir Korea Utara di sekitarnya. Selain itu, hal tersebut juga mengacu kepada pertimbangan strategis terpenting bagi Amerika Serikat di tingkat global. Dengan memperkuat aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan dan memberikan bantuannya kepada Amerika Serikat untuk menahan ekspansi militer China, Korea Selatan

dapat meningkatkan statusnya sebagai negara yang andal, yang sangat penting untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara secara damai.

Literatur kedua merupakan artikel dari Jurnal Hubungan Internasional Universitas Mulawarman yang ditulis oleh Indryanti Pringgodigdo Joyo Negoro pada tahun 2019 yang berjudul “KEBIJAKAN PENEMPATAN SISTEM ANTI RUDAL AMERIKA SERIKAT DI KOREA SELATAN (Negoro, 2019)”. Artikel jurnal tersebut membahas mengenai alasan dari Amerika Serikat dalam menempatkan sistem anti misil di Korea Selatan. Amerika Serikat merupakan negara yang sangat memprioritaskan keamanannya untuk dapat menunjang kepentingan nasionalnya sekaligus kepentingan yang terletak di negara-negara sekutunya. Hal tersebut mendorong Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan pertahanan di negara sekutu, yang memang sudah lama dilakukan di negara sekutunya seperti Australia dan Jepang. Amerika Serikat kemudian juga menempatkan kebijakan pertahanan di Korea Selatan, yakni Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) sejak tahun 2017.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwasanya terdapat berbagai alasan yang mendasari Amerika Serikat dalam melakukan kerja sama dengan Korea Selatan guna menempatkan THAAD. Alasan pertama ialah adanya instabilitas keamanan Asia Timur yang membuat Amerika Serikat ingin menjaga keamanan kawasan dan membangun pola *amity* dengan Korea Selatan sebagai negara aliansinya. Alasan kedua ialah adanya keinginan untuk dapat menggali informasi melalui THAAD, dimana radar yang dimiliki oleh THAAD dapat melacak persenjataan negara-negara Asia Timur, khususnya Korea Utara. Hal inilah yang kemudian mendorong China untuk menolak penempatan THAAD dengan tegas, karena dikhawatirkan Amerika Serikat juga akan memanfaatkan THAAD untuk dapat melacak sistem informasi alutsista China.

Literatur ketiga merupakan artikel dari Jurnal Naval War College Review yang ditulis oleh Robert C. Watts IV pada tahun 2018 yang berjudul “ROCKETS’ RED GLARE—WHY DOES CHINA OPPOSE THAAD IN SOUTH KOREA, AND WHAT DOES IT MEAN FOR U.S. POLICY? (Watts, 2018)”. Artikel

tersebut membahas mengenai ketidaksetujuan China terhadap keputusan Amerika Serikat dalam menyebarkan THAAD di Korea Selatan serta bagaimana implikasi dari ketidaksetujuan tersebut terhadap kebijakan Amerika Serikat kedepannya. Meskipun THAAD ditujukan untuk mempertahankan Amerika Serikat dan pasukan sekutu dari rudal balistik Korea Utara, tanggapan China terhadap kebijakan THAAD sangat keras. China menentang keputusan tersebut dan mengatakan bahwa pengerahan THAAD akan menyabotase kepentingan keamanan strategis negara-negara regional termasuk China.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwasanya kebijakan Amerika Serikat kedepannya sangat dipengaruhi oleh ketidaksetujuan China terhadap THAAD. Amerika Serikat harus menghargai kekhawatiran China tentang dampak potensial THAAD, namun kebijakan Amerika Serikat dalam menghadapi kemajuan rudal Korea Utara tidak boleh terpengaruh dengan argumen China bahwasanya THAAD bisa memicu perlombaan senjata. Selain itu, Amerika Serikat harus memanfaatkan kerjasama THAAD untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan membangun trilateral Amerika Serikat–Jepang–Korea Selatan. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, oposisi Beijing terhadap THAAD seharusnya tidak membuat Amerika Serikat mempertimbangkan kembali mengenai kebijakannya dalam bekerja sama dengan Korea Selatan, namun hal tersebut justru harus memperkuat nilai dan potensi aliansi Amerika Serikat di Asia Timur.

Literatur keempat merupakan artikel dari jurnal *Contemporary Security Policy* yang ditulis oleh Inwook Kim dan Soul Park pada tahun 2019 yang berjudul ‘‘DETERRENCE UNDER NUCLEAR ASYMMETRY: THAAD AND THE PROSPECTS FOR MISSILE DEFENSE ON THE KOREAN PENINSULA (Kim & Park, 2019)’’. Penulis artikel tersebut memiliki persepsi bahwasanya penempatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan telah menghasilkan banyak masalah yang sangat dipolitisasi dan sangat kontroversial. Terdapat dua pertanyaan yang ada dalam penelitian tersebut, salah satunya adalah apakah THAAD benar-benar bisa mempertahankan Korea Selatan dari rudal Korea Utara. Artikel tersebut juga mengkaji lebih lanjut mengenai cara yang lebih optimal

untuk menjaga keamanan nasional Korea Selatan dari ancaman rudal yang dihasilkan oleh Korea Utara.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwasanya seharusnya Amerika Serikat memperkuat kerangka kerja sama yang telah ada, ketimbang menambahkan sistem pertahanan baru di Korea Selatan. Artikel tersebut juga menyarankan bahwasanya penempatan THAAD di Korea Selatan harus memperhitungkan beberapa hal yang lebih kompleks, jangka panjang dan sangat strategis. Hal-hal tersebut meliputi berbagai dimensi, seperti kredibilitas Amerika Serikat, keseimbangan strategis regional antara Amerika Serikat dan China, dan hubungan keamanan-perdagangan dalam hubungan Korea Selatan dan China. Pada intinya, pemberlakuan THAAD harus dapat menyeimbangkan komponen penting.

Literatur kelima merupakan skripsi yang ditulis oleh Definal dari USNI pada tahun 2019 yang berjudul ‘‘IMPLIKASI PENEMPATAN SISTEM PERTAHANAN MISIL TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) DI KOREA SELATAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL KOREA SELATAN DAN TIONGKOK (Definal, 2019)’’. Skripsi tersebut membahas mengenai dampak signifikan yang ditimbulkan dari penempatan THAAD di Korea Selatan sebagai bentuk pertahanan dari percobaan rudal balistik Korea Utara, dimana hal tersebut mendorong penolakan dari pihak Tiongkok.

Skripsi tersebut menyimpulkan bahwasanya polemik yang terjadi di antara Korea Selatan, Korea Utara dan Tiongkok tidak terlepas dari faktor historis yang juga melibatkan kehadiran Amerika Serikat. Kerja sama Korea Selatan dan Amerika Serikat mencederai hubungan bilateral Korea Selatan dan Tiongkok, dimana hal tersebut membuat Tiongkok memberlakukan kebijakan yang berkenaan dengan aspek politik, budaya dan ekonomi yang tentunya sangat merugikan bagi Korea Selatan. Skripsi tersebut juga menyarankan agar Tiongkok seharusnya tidak serta merta mengambil keputusan sepihak dalam memberlakukan berbagai kebijakan yang merugikan Korea Selatan.

Literatur keenam merupakan artikel dari Journal of Contemporary East Asia Studies yang ditulis oleh Jaeho Hwang pada tahun 2021 yang berjudul ‘‘THE

CONTINUOUS BUT ROCKY DEVELOPMENTS OF SINO-SOUTH KOREAN RELATIONS: EXAMINED BY THE FOUR FACTOR MODEL (Hwang, 2021)''.

Artikel tersebut membahas mengenai relasi antara Korea Selatan dan China sejak kedua negara tersebut meresmikan hubungan persahabatan dan kerja sama pada tahun 1992. Kedua negara telah mencapai kemajuan besar dalam hubungannya, dimana Korea Selatan dan China telah menjalin kerja sama ekonomi yang menjanjikan, menemukan kesamaan dalam kebijakan luar negeri, dan senantiasa mengalami peningkatan hubungan. Akan tetapi, hubungan kedua negara saat ini dipenuhi oleh konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dalam berbagai bidang.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwasanya meskipun hubungan antara Korea Selatan dan China selalu meningkat setiap 5 tahun, terdapat tumpang tindih kepentingan yang melampaui batas-batas budaya, geografis, kedekatan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi, termasuk perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Terlebih dengan berbagai fenomena yang terjadi di antara hubungan kedua negara saat ini, salah satunya ialah karena penempatan THAAD. Korea Selatan dan China harus dapat membangun hubungan yang memungkinkan penyelesaian konflik dan kesalahpahaman melalui berbagai dialog dan komunikasi, dan mengupayakan masa depan hubungan bilateral yang lebih baik.

Literatur ketujuh merupakan artikel dari jurnal China Report yang ditulis oleh Seong Hyon-Lee pada tahun 2021 yang berjudul ''SEOUL'S UP-AND-DOWN ROMANCE WITH CHINA AMID US-CHINA RIVALRY: A KOREAN PERSPECTIVE (Lee, 2021)''.

Artikel tersebut membahas mengenai upaya Korea Selatan untuk menjadi *middle power* yang diartikulasikan melalui otonomi dalam kebijakan luar negeri berada di tengah persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Cina. Korea Selatan terlihat semakin condong ke China, terlepas dari fakta bahwasanya negara tersebut adalah sekutu militer Amerika Serikat. Namun, hubungan bilateral antara China dan Korea Selatan juga tidak selalu terjalin dengan baik, terlebih karena dihadapkan dengan sengketa THAAD yang hingga saat ini belum terselesaikan. Artikel tersebut juga menyorot bagaimana Amerika Serikat memainkan peran penting dalam hubungan Korea Selatan dengan China.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwasanya Korea Selatan berupaya untuk mendekati kepada China. Namun, Korea Selatan juga tetap menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat sebagai negara sekutunya dengan menempatkan THAAD di negaranya. Hal tersebut kemudian membuat hubungan Korea Selatan dengan China menjadi memburuk, dan THAAD dianggap sebagai perebutan pengaruh simbolis antara Amerika Serikat dan China. Korea Selatan menjadi bahan perebutan Amerika Serikat dan China karena posisi Korea Selatan yang sangat penting dalam geopolitik Asia Timur. Namun, hingga saat ini Korea Selatan dinilai masih belum mampu dalam menyeimbangkan posisinya di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China.

Literatur kedelapan merupakan artikel dari Jurnal Global Strategis yang ditulis oleh Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, & Dadan Suryadipura pada tahun 2019 yang berjudul ‘REORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK KOREA TERHADAP REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK KOREA DALAM UPAYA REUNIFIKASI (2017-2019) (Nadhiva, Dewi, & Suryadipura, 2019)’. Artikel tersebut membahas mengenai adanya perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara, dimana di bawah kepemimpinan Moon Jae In, terjadi perubahan hubungan antar-Korea melalui upaya reunifikasi yang berbeda dengan Pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan terdapat perkembangan hubungan di Semenanjung Korea, dimana relasi Korea Selatan dan Korea Utara mengalami perbaikan yang cukup drastis.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwasanya kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah kepemimpinan Moon Jae In cenderung lebih independen, berbeda dengan kebijakan pendahulunya yakni Park Geun-Hye yang sangat bergantung kepada aliansi keamanannya, yakni Amerika Serikat. Reorientasi kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara telah memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dalam rentang waktu 2017-2019 memberikan tanda bahwasanya hubungan kedua negara telah membaik.

Literatur kesembilan merupakan artikel dari International Journal yang ditulis oleh Jongryn Mo pada tahun 2016 yang berjudul ‘SOUTH KOREA’S

MIDDLE POWER DIPLOMACY: A CASE OF GROWING COMPATIBILITY BETWEEN REGIONAL AND GLOBAL ROLES (Mo, 2016)'. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana dinamika kebijakan luar negeri Korea Selatan sebagai *middle power* yang memainkan peran penting dalam berbagai isu global.. Optimisme akan kekuatan yang dimiliki oleh kebijakan luar negeri Korea Selatan didasarkan pada fakta bahwa Korea Selatan adalah *middle power* yang tidak hanya berperan aktif dalam pemerintahan internasional, tetapi juga di kawasan Asia Timur. Untuk dapat memaksimalkan potensi *middle power diplomacy*, Korea Selatan harus melakukan berbagai usaha untuk meminimalisir berbagai tantangan.

Artikel jurnal tersebut menyimpulkan bahwasanya *middle power diplomacy* akan senantiasa membentuk kebijakan Korea Selatan dalam tingkat global maupun regional. Perilaku dan strategi kebijakan luar negeri Korea Selatan, seperti multilateralisme, supremasi hukum, dan promosi kerja sama dan kompromi, akan tetap berlaku dalam pelaksanaan politik luar negeri regional Korea Selatan. Akan tetapi, pengaruh Korea sebagai *middle power* dalam tingkat global akan sesuai dengan jumlah sumber daya yang dapat dicurahkan untuk kepemimpinan global. Hingga Korea Selatan mencapai penyelesaian dengan Utara, tantangan dalam tingkat regional akan terus menuntut *resources* kebijakan luar negeri yang besar dari Korea Selatan .

Literatur kesepuluh merupakan artikel dari Jurnal The Pacific Review yang ditulis oleh Soon-ok Shin pada tahun 2015 yang berjudul ‘‘SOUTH KOREA’S ELUSIVE MIDDLEPOWERMANSHIP: REGIONAL OR GLOBAL PLAYER (Shin, 2015)’. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Korea Selatan sebagai *middle power* pada masa Pemerintahan Roh Moo-hyun dan Lee Myung-bak. Korea Selatan memiliki visi untuk menjadi pemain utama dalam tingkat regional dan global, namun kemudian menghadapi kesenjangan antara retorika dan realita dalam kebijakan luar negerinya. Dalam artikel tersebut, dijelaskan juga bagaimana kondisi politik dan kelembagaan dalam negeri membentuk kebijakan luar negeri Korea Selatan.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwasanya aktivitas politik luar negeri Korea Selatan di bawah kepemimpinan Roh dan Lee menunjukkan bahwasanya

sedari dulu Korea Selatan memang telah berupaya aktif sebagai suatu *middle power*. Akan tetapi, terlepas dari keinginan Korea Selatan menjadi *middle power* di tingkat global, realita yang terjadi adalah Korea Selatan masih menjadi aktor yang relatif kecil dalam struktur Asia Timur. Adanya ancaman keamanan di Semenanjung Korea masih membatasi kemampuan Korea Selatan untuk dapat menjalankan *middle power internationalism*.

Dari pemaparan diatas, terlihat bahwasanya literatur pertama membahas mengenai alasan Korea Selatan menempatkan THAAD di tengah rivalitas China dan Amerika Serikat. Literatur kedua membahas mengenai alasan Amerika Serikat menempatkan THAAD di Korea Selatan. Literatur ketiga membahas mengenai implikasi dari ketidaksetujuan China akan THAAD terhadap kebijakan Amerika Serikat. Literatur keempat membahas mengenai evaluasi kebijakan THAAD di Korea Selatan. Literatur kelima membahas mengenai dampak THAAD terhadap hubungan bilateral Korea Selatan dan China. Literatur keenam membahas mengenai evaluasi hubungan bilateral Korea Selatan dan China serta tantangan yang dihadapi oleh kedua negara. Literatur ketujuh membahas mengenai posisi kebijakan Korea Selatan di tengah Amerika Serikat dan China. Literatur kedelapan membahas mengenai adanya perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menyikapi ancaman nuklir Korea Utara pada masa kepemimpinan Presiden Moon Jae In. Literatur kesembilan membahas mengenai kebijakan luar negeri Korea Selatan sebagai *middle power*. Literatur kesepuluh membahas mengenai tantangan kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Roh Moo-hyun dan Lee Myung-bak.

Dapat disimpulkan bahwasanya terdapat keterkaitan dari berbagai literatur diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dimana penulis akan melakukan penelitian yang berfokus mengenai kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menyikapi sanksi ekonomi China terkait penempatan THAAD.

1.3 Rumusan Masalah

Tujuan Korea Selatan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat untuk memberlakukan THAAD bersifat defensif, yakni melindungi diri dari ancaman yang dapat ditimbulkan akibat agresivitas nuklir Korea Utara. Namun, hal tersebut ditentang oleh China yang menganggap THAAD sebagai suatu ancaman. Pertentangan China terhadap THAAD menimbulkan permasalahan baru bagi Korea Selatan, yakni diberlakukannya sanksi ekonomi dari China sebagai mitra dagang terbesar Korea Selatan. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menyikapi sanksi ekonomi China. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menyikapi sanksi ekonomi China terkait penempatan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Mengetahui sanksi ekonomi China terhadap Korea Selatan terkait penempatan THAAD dan kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menyikapi sanksi ekonomi China.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peminat studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menghadapi sanksi ekonomi China terkait penempatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengkaji kebijakan luar negeri agar dapat lebih memahami bagaimana respon kebijakan luar negeri Korea Selatan sebagai tindakan yang berorientasi terhadap kepentingan nasionalnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini menjadi beberapa bab, yakni sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama dalam penelitian ini membahas mengenai latar belakang penelitian, penelitian terdahulu, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua dalam penelitian ini membahas mengenai teori dan konsep yang dijadikan alat menganalisis permasalahan yang diangkat oleh penulis, yakni teori model adaptif politik luar negeri dan konsep normalisasi. Bab ini juga menampilkan kerangka pemikiran dari skripsi penulis.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga dalam penelitian ini membahas mengenai objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta rencana waktu penelitian.

- **BAB IV KEBIJAKAN PENEMPATAN SISTEM PERTAHANAN TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) DI KOREA SELATAN**

Bab keempat dalam penelitian ini membahas mengenai gambaran umum terkait Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), kebijakan penempatan THAAD di Korea Selatan pada masa pemerintahan Park Geun-hye, dan penolakan China terhadap THAAD.

- **BAB V KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN DALAM MENYIKAPI SANKSI EKONOMI CHINA TERKAIT PENEMPATAN THAAD**

Bab kelima dalam penelitian ini membahas mengenai sanksi ekonomi China terhadap Korea Selatan, dan kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menyikapi sanksi ekonomi China terkait penempatan THAAD.

- **BAB VI PENUTUP**

Bab keenam dari penelitian ini membahas simpulan dan saran dari penulis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini.